PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901–689905, Pos-el bagian_umum@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : **000.8.6.3/20/418.74/2026**

TENTANG
RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran dalam pelaksanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri tahun 2026, perlu disusun Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri sesuai Perjanjian Kinerja yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri tentang Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 - 2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026;

13. Peraturan Bupati Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026.

KEDUA : Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026 menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi, Laporan Kinerja Interim dan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026.

KETIGA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 9 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEDIRI



STEFANUS DJOKO SUKRISNO

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kediri (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901–689905, Pos-el bagian_umum@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 000.8.6.3/ 138 /418.74/2026
TENTANG
HASIL RAPAT PENETAPAN RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2026

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Sembilan* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* bertempat di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat penyusunan Penetapan Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri sebagai berikut;

Pimpinan Rapat
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.

Peserta Rapat
1. Pejabat Struktural di Lingkup BPBD Kabupaten Kediri.
2. Pejabat Fungsional di Lingkup BPBD Kabupaten Kediri.
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup BPBD Kabupaten Kediri.

Hasil Rapat
1. Penyusunan Rencana Aksi Capaian Kinerja yang dilampirkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri tentang Penetapan Rencana Aksi Capaian Kinerja;
2. Rencana Aksi Capaian Kinerja dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja Indikator Kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja interim, dan implementasi akuntabilitas kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri;
3. Perlu disusun Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri terkait Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris **DIAN DWI PERMANA, S.STP**	1. .....
2	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi **BAYU ADI SANTOSO, ST., MM.**	2. .....
3	Analis Kebencanaan Ahli Pertama **DADIK RAHARDJA, S.Sos**	3. .....

Mengetahui,
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kediri

STEFANUS DJOKO SUKRISNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19691226 198903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri
Nomor : 000.8.6.3/20/418.74/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	**Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka Penanggulangan Bencana**	**Persentase capaian SPM Trantibumlinmas dalam rangka penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kediri**	**100 %**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**5.017.668.500**	
2				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Program yang mendukung tugas kedinasan kepala daerah.**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25 %**	**953.175.225**	**50 %**	**1.906.350.450**	**75 %**	**2.859.525.675**	**100 %**	**3.812.700.900**	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
3				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kegiatan penataan keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25 %**	**886.790.900**	**50 %**	**1.773.581.800**	**75 %**	**2.660.372.700**	**100 %**	**3.547.163.600**	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
4				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan komponen lainnya selama 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Orang/ Bulan	858.895.500	7 Orang/ Bulan	1.717.791.000	11 Orang/ Bulan	2.576.686.500	14 Orang/ Bulan	3.435.582.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium jasa mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	9.450.000	7 Dokumen	18.900.000	10 Dokumen	28.350.000	13 Dokumen	37.800.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
6				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran honorarium pengelola keuangan/tim verifikasi yang menangani penatausahaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 Doku-men	18.445.400	6 Doku-men	36.890.800	9 Doku-men	55.336.200	12 Doku-men	73.781.600	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
7				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**25 %**	**37.866.925**	**50 %**	**75.733.850**	**75 %**	**113.600.775**	**100 %**	**151.467.700**	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
8				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.392.675	6 Paket	12.785.350	9 Paket	19.178.025	12 Paket	25.570.700	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
9				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditetapkan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.640.000	6 Paket	5.280.000	9 Paket	7.920.000	12 Paket	10.560.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
10				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Penyediaan kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar untuk menunjang pelaksanaaan tugas administrasi perkantoran dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Doku-men	1.320.000	6 Doku-men	2.640.000	9 Doku-men	3.960.000	12 Doku-men	5.280.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
11				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan fasilitasi pertemuan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD dengan instansi terkait atau pemerintah pusat/daerah yang dilaksanakan bertahap selama 1 tahun anggaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lapo-ran	27.514.250	6 Lapo-ran	55.028.500	9 Lapo-ran	82.542.750	12 Lapo-ran	110.057.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
12				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan daerah**	**Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25 %**	**2.483.900**	**50 %**	**4.967.800**	**75 %**	**7.451.700**	**100 %**	**9.935.600**	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
13				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor untuk mendukung kelancaran operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lapo-ran	2.483.900	6 Lapo-ran	4.967.800	9 Lapo-ran	7.451.700	12 Lapo-ran	9.935.600	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
14				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan kegiatan untuk memelihara aset daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25 %**	**26.033.500**	**50 %**	**52.067.000**	**75 %**	**78.100.500**	**100 %**	**104.134.000**	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
15				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksanaan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional secara optimal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	19.625.000	6 Unit	39.250.000	9 Unit	58.875.000	12 Unit	78.500.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
16				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan baik untuk memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas operasional	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6.408.500	6 Unit	12.817.000	9 Unit	19.225.500	12 Unit	25.634.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
17				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Penyediaan program untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana**	**Persentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**15,31 %**	**184.466.950**	**56,04 %**	**675.285.700**	**68,56 %**	**826.119.850**	**100 %**	**1.204.967.600**	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
18				**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Penyediaan kegiatan yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat tentang wilayah rawan bencana**	**Persentase tersedianya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota**	**7,86 %**	**12.800.500**	**100 %**	**162.800.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
19				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pelaksanaan Sub kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	50 orang	12.800.500	-	-	-	-	-	-	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
20				Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Penyediaan dokumen dasar untuk	Jumlah dokumen Kajian Risiko	-	-	1 Doku-	150.000.000	-	-	-	-	Pejabat Pelaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Kabupaten/Kota	menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah.	Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			men						Teknis Kegiatan (PPTK)
21				**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Penyediaan kegiatan pelayanan untuk untuk mengurangi risiko dan dampak bencana**	**Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**-**	**-**	**40,20 %**	**125.271.000**	**99,83 %**	**311.120.500**	**100 %**	**311.620.000**	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
22				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan peralatan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta memastikan respons yang efektif	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-	-	-	-	-	-	1 unit	500.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
23				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelaksanaan sub kegiatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	600 orang	35.849.500	-	-	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
24				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Pelaksanaan sub kegiatan untuk meningkatkan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis	-	-	3 Kawa-san	90.325.500	-	-	-	-	Pejabat Pelaksana Teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Kesiapsiagaan Bencana	kemampuan kawasan dalam menghadapi bencana yang bertujuan agar masyarakat dapat tangguh terhadap bencana	ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana									Kegiatan (PPTK)
25				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dokumen RPB sebagai panduan strategis yang komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi untuk mengurangi risiko serta dampak bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	1 Doku-men	150.000.000	-	-	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
26				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan sub kegiatan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana (pra-bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	7 Kawa-san	34.945.000	-	-	-	-	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
27				**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban**	**Penyediaan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada**	**Persentase penyelamatan dan evakuasi**	**25 %**	**171.666.450**	**50 %**	**343.332.900**	**75 %**	**514.999.350**	**100 %**	**686.665.800**	**Pejabat Pelaksana Teknis**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Bencana	**saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana**	**korban bencana**									**Kegiatan (PPTK)**
28				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan sub kegiatan dalam upaya untuk mencari menolong menyelamatkan dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25 orang	114.519.250	50 orang	229.038.500	75 orang	343.557.750	100 orang	458.077.000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
29				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25 orang	57.147.200	50 orang	114.294.400	75 orang	171.441.600	100 orang	228.588.800	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
30				**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan**	**Penyediaan kegiatan untuk mendukung pemulihan pasca**	**Persentase pelaksanaan kegiatan**	-	-	**100 %**	**43.881.300**	-	-	-	-	**Pejabat Pelaksana Teknis**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Uraian/ Penjelasan (Tahapan Aksi)	Indikator	Target								Penanggung-Jawab
							TW1	Anggaran	TW2	Anggaran	TW3	Anggaran	TW4	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				Bencana	**bencana dan mengurangi risiko bencana**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**									**Kegiatan (PPTK)**
31				Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan sub kegiatan meliputi kompetensi karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-	-	180 orang	43.881.300	-	-	-	-	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ditandatangai secara elektronik oleh :
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri,

STEFANUS DJOKO SUKRISNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19691226 198903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).